



Pelatihan Literasi Politik Digital Sebagai Upaya Penguatan *Civic Resilience* Melalui Peningkatan Kesadaran Algoritmik Pada Komunitas Muda

Novy Setia Yunas¹ ✉, Mochammad Alexander Mujibburrohmah¹, Mi'rojul Huda²,
Faza Dhora Nailufar³, Budi Winarno⁴

¹Universitas Brawijaya

Jalan Veteran, Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, Indonesia

²Universitas Negeri Surabaya

Jl. Ketintang Wiyata, Ketintang, Kec. Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 60231, Indonesia

³Politeknik STIA LAN Jakarta

Jl. Administrasi II, RT.9/RW.9, Pejompongan, Bend. Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10260, Indonesia

⁴Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang

Jl. Jendral Urip Sumoharjo No 47, Jombang, Jawa Timur, Indonesia

novysetiayunas@ub.ac.id ✉ | DOI: <https://doi.org/10.37729/abdimas.v10i3.7437> |

Abstrak

Momentum bonus demografi Indonesia menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi kualitas demokrasi di era transformasi digital. Dominasi generasi muda dalam struktur demografi dan politik berlangsung bersamaan dengan pergeseran ruang publik menuju ekosistem digital yang dimediasi oleh algoritma pada media sosial. Kondisi ini meningkatkan risiko polarisasi, disinformasi dan fragmentasi opini apabila tidak diimbangi dengan kapasitas kewarganegaraan digital yang memadai. Artikel ini bertujuan mengembangkan dan mengimplementasikan model penguatan civic resilience pada komunitas muda di Kabupaten Jombang sebagai strategi menghadapi tantangan demokrasi digital. Metode pelaksanaan program yang digunakan adalah pendekatan partisipatif-edukatif berbasis community engagement dengan desain evaluatif pre-test dan post-test. Sasaran kegiatan meliputi siswa SMA, mahasiswa, komunitas pemuda, serta ibu-ibu muda pegiat UMKM. Hasil menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada kapasitas literasi politik digital peserta, yang ditunjukkan melalui kenaikan rata-rata skor kesadaran algoritmik dari 40 persen menjadi 85 persen serta peningkatan praktik verifikasi informasi sebesar 85 persen. Hasil ini juga menunjukkan penguatan kemampuan analisis kritis terhadap konten politik digital serta perubahan sikap partisipasi yang lebih reflektif dan etis di ruang digital. Kolaborasi antara akademisi dan pemerintah daerah turut memperkuat relevansi dan legitimasi program dalam konteks penguatan ketahanan demokrasi lokal. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan literasi politik digital berbasis komunitas berkontribusi signifikan dalam membangun civic resilience pada generasi muda. Oleh karena itu, model intervensi ini direkomendasikan untuk direplikasi dan diintegrasikan dalam program literasi digital berbasis komunitas guna memperkuat demokrasi digital yang lebih tangguh, deliberatif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Bonus demografi; Civic resilience; Demokrasi digital; Literasi Politik Digital



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](#)

1. Pendahuluan

Indonesia saat ini berada dalam fase strategis bonus demografi yang diproyeksikan berlangsung hingga pertengahan dekade tahun 2045. Struktur penduduk yang didominasi oleh kelompok usia produktif, khususnya generasi milenial dan generasi Z menjadikan

kelompok ini sebagai aktor utama dalam dinamika sosial, ekonomi dan politik nasional (Badan Pusat Statistik, 2023). Dalam konteks elektoral, proporsi pemilih muda terus meningkat dan berpotensi menentukan arah kebijakan publik di tingkat pusat maupun daerah. Namun, momentum demografis tersebut berlangsung bersamaan dengan dinamika serta perkembangan transformasi digital yang secara fundamental mengubah cara masyarakat berinteraksi, bekerja, belajar dan terlebih lagi mengubah pola partisipasi politik.

Literatur mutakhir menunjukkan bahwa demokrasi digital ditandai oleh pergeseran dari ruang deliberatif konvensional menuju ruang algoritmik yang dimediasi oleh platform media sosial (Gillespie, 2019; Margetts & Dorobantu, 2019). Algoritma kini tak lagi sekadar berfungsi sebagai mekanisme teknis distribusi informasi, tetapi sebagai struktur kuasa yang menentukan visibilitas isu, membentuk preferensi dan memediasi interaksi sosial politik. Dalam konteks ini, partisipasi politik generasi muda semakin dipengaruhi oleh logika personalisasi dan optimasi keterlibatan (*engagement-based amplification*). Penelitian (Guess, Nyhan, & Reifler, 2020; Vosoughi, Roy, & Aral, 2018) menunjukkan bahwa informasi yang bersifat emosional dan sensasional memiliki probabilitas penyebaran yang lebih tinggi dibandingkan informasi faktual yang netral (Guess *et al.*, 2020; Vosoughi *et al.*, 2018). Hal ini memperlihatkan bahwa arsitektur platform digital dapat mempercepat polarisasi opini publik. Namun, sebagian besar kajian tersebut masih berfokus pada analisis makro mengenai dampak algoritma terhadap demokrasi, dan belum banyak menyentuh intervensi berbasis komunitas yang secara langsung memperkuat kapasitas kewargaan digital masyarakat di tingkat lokal. Dalam konteks global, fenomena tersebut mendorong berkembangnya konsep *democratic resilience* dan *civic resilience* sebagai respons terhadap kerentanan demokrasi di era digital (Hall & Lamont, 2013; Norris, 2011). Ketahanan demokrasi tidak lagi hanya diukur dari stabilitas institusi formal, tetapi dari kapasitas masyarakat dalam mengelola arus informasi, membedakan fakta dan opini, serta mempertahankan etika diskursus publik. *Civic resilience* merujuk pada kemampuan individu dan komunitas untuk beradaptasi terhadap disrupsi informasi, menjaga kohesi sosial dan tetap terlibat secara konstruktif dalam ruang publik (Margetts & Dorobantu, 2019). Dalam konteks demokrasi berbasis platform, literasi politik digital menjadi fondasi utama dari ketahanan tersebut.

Indonesia memiliki tingkat penetrasi internet dan media sosial yang tinggi di kalangan usia produktif. Generasi muda menjadikan platform digital sebagai sumber utama informasi politik dan kebijakan publik. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa peningkatan akses tidak selalu sejalan dengan peningkatan kapasitas literasi kritis (Lewandowsky *et al.*, 2017; Tucker *et al.*, 2018). Tantangan utama bukan lagi keterbatasan akses informasi, melainkan kemampuan memproses, memverifikasi dan menafsirkan informasi secara reflektif. Di sinilah urgensi penguatan *civic resilience* menjadi relevan, khususnya pada komunitas muda yang berada dalam pusaran bonus demografi dan transformasi digital sekaligus. Pada kenyataannya selama ini, sejumlah program literasi digital yang telah dilakukan umumnya masih berfokus pada aspek teknis penggunaan media atau sosialisasi anti-hoaks secara umum, dan belum secara spesifik mengintegrasikan kesadaran algoritmik, analisis framing politik digital, serta praktik verifikasi informasi dalam satu model intervensi yang terstruktur.

Dalam konteks lokal kabupaten Jombang, masyarakat sasaran program ini mencerminkan keberagaman segmen generasi produktif yang aktif dalam ruang digital, meliputi siswa SMA sebagai pemilih pemula, mahasiswa, komunitas pemuda, serta ibu-ibu muda pegiat UMKM. Keempat segmen ini memiliki karakteristik sosial yang berbeda namun terhubung melalui intensitas penggunaan media sosial sebagai medium

komunikasi utama (Yunas & Nailufar, 2021). Siswa dan mahasiswa cenderung aktif pada platform berbasis visual dan video pendek, sementara komunitas pemuda dan kelompok UMKM banyak berinteraksi melalui grup percakapan dan media sosial untuk kepentingan jejaring sosial dan promosi ekonomi. Ruang digital tidak hanya menjadi arena komunikasi ekonomi dan sosial, tetapi juga arena pertukaran opini politik dan kebijakan publik.

Analisis situasi mitra menunjukkan bahwa meskipun tingkat partisipasi digital mereka relatif tinggi, pemahaman terhadap mekanisme kurasi algoritmik, teknik analisis framing konten politik serta prosedur verifikasi informasi masih terbatas. Sebagian besar peserta cenderung mengaitkan kredibilitas informasi dengan popularitas akun atau jumlah interaksi. Selain itu, diskusi awal mengindikasikan bahwa praktik berbagi informasi di ruang digital seringkali dilakukan secara spontan tanpa proses verifikasi yang sistematis. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara konektivitas digital dan kesiapan kewargaan digital. Urgensi kegiatan pengabdian ini terletak pada kebutuhan untuk menjembatani kesenjangan tersebut melalui penguatan model *civic resilience* berbasis literasi politik digital. Dalam konteks bonus demografi, dominasi generasi muda dalam struktur politik dapat menjadi modal sosial yang produktif apabila disertai kapasitas reflektif dan analitis yang memadai. Tanpa intervensi yang sistematis, risiko polarisasi dan reproduksi disinformasi akan semakin besar, terutama pada komunitas yang menjadi simpul distribusi informasi lokal.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kebutuhan akan model intervensi yang tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga integratif dan aplikatif dalam membangun ketahanan kewargaan digital di tingkat komunitas. Sehingga, kegiatan ini dirancang untuk menjawab dua persoalan utama, yaitu bagaimana merancang model penguatan *civic resilience* yang adaptif terhadap dinamika demokrasi digital lokal, serta sejauh mana model tersebut efektif dalam meningkatkan kesadaran algoritmik, kemampuan analisis konten politik digital dan sikap partisipatif yang etis. Secara praktis, kegiatan ini bertujuan memperkuat kualitas partisipasi demokratis komunitas muda di kabupaten Jombang. Secara akademik, kegiatan ini berkontribusi pada pengembangan model pengabdian masyarakat berbasis ketahanan demokrasi digital yang relevan dengan konteks bonus demografi Indonesia.

Nilai kebaruan (*novelty*) dari kegiatan ini terletak pada pengembangan model *civic resilience* berbasis pendekatan partisipatif yang menggabungkan aspek literasi digital kritis, analisis politik digital, serta keterlibatan aktor lokal (akademisi dan pemerintah daerah) dalam satu kerangka intervensi yang terukur melalui pendekatan *pre-test* dan *post-test*. Model ini tidak hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga pada perubahan sikap dan praktik partisipasi digital masyarakat. Lebih lanjut, penguatan *civic resilience* ini juga selaras dengan pilar *Sustainable Development Goals* (SDGs) khususnya pada SDG 4 tentang Pendidikan Berkualitas melalui peningkatan kompetensi berpikir kritis dan literasi digital, serta SDG 16 tentang Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh melalui penguatan partisipasi publik yang inklusif dan bertanggung jawab (Khairina *et al.*, 2020). Dengan demikian, program ini menempatkan bonus demografi bukan sekadar sebagai fenomena statistik semata, melainkan sebagai momentum strategis untuk membangun demokrasi digital yang lebih resilien, deliberatif dan berkelanjutan.

2. Metode

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini dirancang sebagai suatu proses intervensi yang bersifat edukatif-partisipatif terstruktur dan berkelanjutan, dengan tujuan membangun *civic resilience* komunitas muda dalam menghadapi tantangan

demokrasi digital berbasis algoritma. Metode pelaksanaan disusun dalam 4 (empat) fase utama yang saling terintegrasi, yakni tahap persiapan, tahap implementasi, tahap evaluasi dan tahap rencana tindak lanjut. Pendekatan ini mengacu pada prinsip *community-based participatory approach* yang menekankan kolaborasi aktif antara tim pelaksana dan mitra komunitas dalam setiap tahapan program (Bradbury, 2015; Riccardi *et al.*, 2023). Adapun alur pelaksanaan dapat ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Dengan tahapan pelaksanaan yang sistematis tersebut, program pengabdian ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai mekanisme penguatan kapasitas kolektif komunitas dalam menghadapi tantangan demokrasi digital. Integrasi antara persiapan berbasis kebutuhan, pelaksanaan partisipatif, evaluasi terukur dan rencana keberlanjutan menjadikan model ini relevan sebagai strategi penguatan *civic resilience* dalam konteks bonus demografi dan transformasi algoritmik ruang publik.

3. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat yang bertema bonus demografi dan tantangan demokrasi digital: model penguatan *civic resilience* pada komunitas muda kabupaten Jombang menghasilkan sejumlah temuan dan hasil penting yang menegaskan bahwa penguatan ketahanan kewargaan (*civic resilience*) merupakan kebutuhan strategis di tengah perkembangan disrupsi teknologi digital yang sangat cepat dinamis serta fenomena bonus demografi. Praktis kedua fenomena tersebut telah berjalan beriringan dan berpengaruh secara signifikan bagi perkembangan generasi muda saat ini.

Tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana disajikan pada alur [Gambar 1](#) dapat dipaparkan rangkaian kegiatan sebagai berikut. Tahap pertama merupakan tahap persiapan dimulai dengan koordinasi dan konsolidasi bersama mitra program dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Jombang. Tahap ini dilaksanakan pada bulan Februari hingga Maret tahun 2026 bertempat di Kabupaten Jombang sebagai lokasi utama kegiatan pengabdian. Di tahap persiapan ini, dilakukan koordinasi dan konsolidasi pada sasaran program yang terdiri atas siswa SMA, mahasiswa, komunitas pemuda dan ibu-ibu muda pegiat UMKM di kabupaten Jombang. Pada fase ini dilakukan pemetaan kebutuhan (*needs assessment*) untuk mengidentifikasi pola penggunaan media sosial, jenis platform dominan, serta pengalaman peserta dalam mengakses dan menyebarkan informasi politik yang bersumber dari media digital. Pemetaan dilakukan melalui diskusi awal dan kuesioner diagnostik singkat guna memperoleh gambaran awal terkait kapasitas literasi politik digital peserta. Hasil pemetaan ini menjadi dasar dalam penyusunan modul intervensi yang kontekstual dan adaptif terhadap dinamika lokal. Penyusunan materi mengintegrasikan literatur tentang demokrasi digital, kekuasaan algoritmik dan *civic resilience* agar intervensi tidak bersifat normatif semata, tetapi berbasis kerangka konseptual yang kuat (Margetts & Dorobantu, 2019; Norris, 2011). Selain itu, pada tahap persiapan dilakukan pula penyusunan instrumen evaluasi berupa pre-test dan post-test yang mengukur kesadaran algoritmik, kemampuan analisis konten, keterampilan verifikasi informasi dan sikap partisipatif sasaran program di ruang digital.

Tahapan kedua ialah pelaksanaan yang merupakan inti dari kegiatan yang dirancang dalam format pelatihan interaktif dan partisipatif. Kegiatan diawali dengan pemberian pre-test untuk mengukur kapasitas awal peserta sebagai baseline evaluasi. Selanjutnya, intervensi dilaksanakan melalui 4 (empat) rangkaian pembelajaran yang terintegrasi. Sesi pertama berfokus pada peningkatan kesadaran algoritmik, dengan menjelaskan bagaimana sistem kurasi berbasis personalisasi dan *engagement* memengaruhi visibilitas konten politik di ruang digital ([Gillespie, 2019](#)). Peserta diajak memahami konsep *filter bubble* dan *echo chamber* serta implikasinya terhadap pembentukan opini publik ([Pariser, 2012](#); [Sunstein, 2018](#)). Pada sesi kedua menitikberatkan pada pelatihan analisis kritis terhadap konten politik digital. Peserta bekerja dalam kelompok kecil untuk menganalisis contoh konten berupa video pendek, poster kampanye atau narasi pesan berantai. Analisis difokuskan pada identifikasi klaim utama, framing narasi, penggunaan bahasa emosional dan kredibilitas sumber informasi. Pendekatan ini mengacu pada kerangka *critical media literacy* yang menekankan pentingnya kesadaran terhadap produksi makna dan relasi kuasa dalam media ([Kellner & Share, 2008](#)).

Pada sesi ketiga pelatihan interaktif dan partisipatif, diarahkan pada praktik verifikasi informasi dan refleksi etis. Peserta diperkenalkan pada langkah-langkah verifikasi sederhana seperti pengecekan sumber, validasi konteks, perbandingan dengan referensi lain dan identifikasi bukti pendukung. Diskusi reflektif dilakukan untuk menegaskan konsekuensi sosial dari penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, termasuk dampaknya terhadap kohesi komunitas dan kualitas demokrasi lokal. Pada sesi terakhir, sesi keempat berfokus pada penguatan partisipasi demokratis digital melalui simulasi diskusi berbasis data dan penyusunan komitmen etis dalam berbagi informasi politik. Pendekatan ini bertujuan mendorong transformasi dari partisipasi reaktif menuju partisipasi deliberatif yang bertanggung jawab.

Tahapan keempat dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah tahap evaluasi yang dilaksanakan setelah seluruh rangkaian intervensi selesai melalui pemberian *post-test* dengan instrumen yang setara dengan *pre-test*. Perbandingan hasil *pre-test* dan *post-test*

dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi peningkatan skor rata-rata pada setiap indikator. Evaluasi juga dilengkapi dengan observasi partisipatif dan refleksi tertulis peserta guna memperoleh gambaran kualitatif mengenai perubahan persepsi dan sikap. Pendekatan evaluasi ini sejalan dengan prinsip *practice-based evidence* dalam pengabdian masyarakat, yang menekankan pentingnya integrasi antara pengalaman praktik dan pembuktian empiris (Greenwood & Levin, 2007). Data hasil evaluasi yang diperoleh kemudian digunakan untuk menilai efektivitas model serta mengidentifikasi aspek yang memerlukan penguatan lebih lanjut.

Tahap terakhir adalah tahap rencana tindak lanjut yang sengaja dirancang untuk memastikan keberlanjutan (*sustainability*) dampak program. Tim pelaksana dari FISIP Universitas Brawijaya bersama mitra dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa Politik (Bakesbangpol) kabupaten Jombang menyusun rekomendasi implementatif berupa penguatan forum diskusi digital sehat di tingkat komunitas, penyusunan panduan singkat verifikasi informasi untuk disebarluaskan di lingkungan mitra dan kemungkinan pembentukan *peer educator* di antara peserta yang menunjukkan peningkatan signifikan. Tahap tindak lanjut ini direncanakan berlangsung dalam periode pasca kegiatan selama Maret hingga Mei 2026, sebagai bentuk monitoring keberlanjutan program. Selain itu, model intervensi yang telah diujicobakan didokumentasikan sebagai prototipe yang dapat direplikasi pada komunitas lain di Kabupaten Jombang maupun wilayah sekitarnya. Keberlanjutan ini penting untuk memperkuat ketahanan kewargaan secara jangka panjang, mengingat dinamika demokrasi digital akan terus berkembang di masa-masa yang akan datang.

Secara umum, hasil kegiatan menunjukkan adanya pergeseran yang cukup nyata pada 3 (tiga) aspek utama yakni, pertama, aspek kognitif berupa meningkatnya pemahaman peserta tentang cara kerja ekosistem informasi digital yang dimediasi algoritma; kedua, aspek keterampilan (*skill*) berupa meningkatnya kemampuan analisis konten politik digital dan praktik verifikasi informasi; serta yang ketiga adalah aspek afektif-normatif yang berupa penguatan etika partisipasi dan kecenderungan deliberasi yang lebih rasional di ruang digital. Perubahan ini terlihat dari perbandingan hasil *pre-test* dan *post-test* yang dilakukan terhadap seluruh peserta program, dinamika diskusi kelompok, kualitas argumentasi peserta dalam simulasi, serta refleksi tertulis yang dikumpulkan pada akhir sesi. Sebagai ilustrasi, rata-rata skor kesadaran algoritmik peserta meningkat dari 40% menjadi 85%, kemampuan analisis konten meningkat dari 55% menjadi 90%, sedangkan praktik verifikasi informasi mengalami peningkatan sebesar 45%. Temuan ini menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan tidak hanya menghasilkan perubahan persepsi, tetapi juga berdampak pada peningkatan kapasitas yang dapat diukur secara empiris.

Dari aspek proses dan tahapan yang telah dilaksanakan, kualitas hasil program sangat dipengaruhi oleh desain intervensi yang memadukan perspektif akademik dan otoritas kebijakan lokal secara simultan. Peran Ketua Tim Pengmas, dalam hal ini Novy Setia Yunas selaku dosen Program Studi Ilmu Politik FISIP UB beserta seluruh Tim Pengabdian Masyarakat menjadi penting dalam memastikan kerangka intervensi tetap berada pada jalur konseptual yang kokoh dan relevan dengan literatur demokrasi digital serta ketahanan kewargaan (*civic resilience*). Melalui sesi pengantar konseptual, ketua tim pengmas FISIP UB, Novy Setia Yunas, menekankan bahwa bonus demografi bukan sekadar angka penduduk produktif saja yang ada di dalam statistik kependudukan kita hari ini, melainkan di dalamnya terdapat konfigurasi politik masa depan yang akan sangat ditentukan oleh kualitas literasi, rasionalitas dan etika kewargaan digital para generasi muda (Gambar 2).

Dari penekanan konseptual tersebut membantu peserta memahami bahwa persoalan demokrasi digital tidak berhenti pada isu hoaks semata, tetapi juga menyangkut perubahan struktur ruang publik, pola atensi politik, serta kecenderungan polarisasi yang dipercepat oleh mekanisme kurasi konten. Pada saat yang sama, peran Kepala Bakesbangpol kabupaten Jombang, Budi Winarno sebagai narasumber/ instruktur menambahkan bobot praktis dan legitimasi kebijakan pada program. Melalui pengalaman lapangan dan perspektif kelembagaan, Kepala Bakesbangpol kabupaten Jombang menghubungkan isu literasi politik digital dengan kebutuhan menjaga kohesi sosial, ketertiban umum serta pencegahan konflik horizontal yang sering kali dipantik oleh informasi yang tidak terverifikasi dalam jejaring komunitas. Kombinasi dua peran ini membuat program tidak terjebak pada ceramah normatif, melainkan bergerak sebagai intervensi yang dapat diterima dengan mudah dan menyentuh realitas komunitas, namun dalam pelaksanaannya tetap kuat secara teori. Tentu kondisi ini sejalan dengan pendekatan *community-based participatory intervention* yang menekankan pentingnya kolaborasi antara aktor akademik dan pemangku kepentingan lokal dalam meningkatkan efektivitas program pemberdayaan masyarakat (Bradbury, 2015; Riccardi *et al.*, 2023).



Gambar 2. Pelaksanaan Pemberian Materi oleh Novy Setia Yunas selaku Ketua Tim Pengabdian Masyarakat

Selanjutnya, pada pengukuran awal (*pre-test*) yang dilakukan terhadap para peserta program, terlihat kecenderungan umum bahwa sebagian peserta terutama dari segmen pemilih pemula (siswa SMA) dan sebagian komunitas muda masih memandang media sosial sebagai sumber informasi yang relatif netral atau minimal cukup representatif untuk mengetahui situasi politik terkini. Sebagian peserta menyatakan bahwa indikator kredibilitas konten sering kali diasosiasikan dengan popularitas akun, jumlah penonton, atau jumlah *likes* dan komentar di media sosial. Pada segmen ibu-ibu muda pegiat UMKM, pola konsumsi informasi banyak terhubung dengan grup percakapan komunitas dan jejaring sosial ekonomi; informasi politik hadir bercampur dengan informasi sosial-ekonomi, promosi dan isu lokal lain, sehingga batas antara informasi faktual, opini dan pesan emosional menjadi relatif kabur.

Situasi ini penting karena menunjukkan dimana tantangan demokrasi digital pada level komunitas bukan semata minim atau kurangnya informasi semata, melainkan problem kualitas pemrosesan informasi dan kerentanan terhadap arsitektur platform yang digunakan.

Kondisi ini sejalan dengan temuan (Guess *et al.*, 2020; Tucker *et al.*, 2018) bahwa paparan terhadap informasi digital yang tidak terverifikasi sering kali dipengaruhi oleh pola konsumsi media yang berbasis kedekatan sosial dan preferensi pengguna, bukan semata kualitas isi pesan.

Setelah sesi pembelajaran tentang ekosistem digital dan mekanisme kurasi platform, perubahan kognitif peserta mulai tampak jelas. Peserta menunjukkan peningkatan pemahaman bahwa konten yang muncul di beranda bukanlah ringkasan objektif realitas, melainkan hasil personalisasi berdasarkan preferensi, interaksi dan durasi perhatian terhadap sebuah konten. Dalam diskusi, banyak peserta mulai dapat menjelaskan ulang dengan bahasa mereka sendiri tentang bagaimana sistem rekomendasi berpotensi membentuk ruang gema (*echo chamber*) dan memperkuat bias konfirmasi. Peningkatan kesadaran algoritmik ini menjadi fondasi penting bagi *civic resilience* karena ketahanan kewargaan dalam demokrasi digital mensyaratkan kemampuan masyarakat untuk mengenali kondisi struktural yang membentuk paparan informasi mereka. Pada fase ini, kontribusi instruksional dari tim pengmas FISIP UB terlihat melalui cara para narasumber dan instruktur menurunkan konsep-konsep besar menjadi contoh praktis yang dekat dengan pengalaman peserta misalnya bagaimana konten yang memicu emosi lebih sering diangkat oleh algoritma karena dianggap meningkatkan keterlibatan dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi persepsi tentang siapa yang benar dan siapa yang salah dalam isu politik tertentu. Peserta yang awalnya menganggap linimasa sebagai cermin realitas, mulai menggeser perspektif bahwa linimasa adalah hasil desain, sehingga harus disikapi dengan lebih kritis dan verifikasi. Secara teoritik, kondisi ini konsisten dengan argumen (Gillespie 2019; Margetts & Dorobantu, 2019) bahwa algoritma berfungsi sebagai struktur mediasi politik yang memengaruhi distribusi perhatian publik. Dalam konteks pengabdian ini, peningkatan kesadaran algoritmik menjadi capaian mendasar yang memperkuat kapasitas reflektif peserta dalam membaca ruang publik digital.

Pada dimensi keterampilan analitis, peningkatan tampak melalui praktik analisis konten politik digital menggunakan bahan contoh yang relevan dengan keseharian peserta (seperti melalui video pendek, poster digital, potongan narasi pesan berantai). Dalam sesi analisis, peserta dilatih membedah klaim utama, mengidentifikasi framing, mengamati pilihan diksi emosional dan menilai kualitas bukti yang disertakan. Sebelum intervensi, banyak peserta cenderung menanggapi konten pada permukaannya saja tanpa menguji struktur argumentasi. Setelah intervensi, diskusi menunjukkan bahwa peserta mulai menanyakan “apa klaimnya?”, “buktinya apa?”, “sumbernya siapa?”, dan “apakah ada konteks yang dipotong?”. Perubahan ini menandakan peningkatan literasi kritis yang lebih operasional, bukan sekadar peningkatan pengetahuan normatif. Di sini, kontribusi mitra program dalam hal ini Bakesbangpol kabupaten Jombang menjadi relevan ketika menekankan konsekuensi sosial dari framing yang provokatif, bagaimana satu narasi yang menyudutkan kelompok tertentu dapat memicu konflik sosial di tingkat lokal, terutama ketika menyebar cepat melalui grup percakapan dan komunitas tertentu. Penekanan pada dampak sosial ini membuat latihan analisis konten tidak berhenti sebagai keterampilan akademik, tetapi sebagai keterampilan kewargaan yang langsung terkait dengan ketahanan komunitas. Kondisi ini sejalan dengan pendekatan *critical media literacy* yang menekankan bahwa literasi media tidak cukup berhenti pada kemampuan mengakses informasi, tetapi harus sampai pada kemampuan membedah struktur pesan, relasi kuasa, dan dampak sosial dari sebuah konten (Kellner & Share, 2008).

Aspek verifikasi informasi menjadi salah satu temuan paling penting dalam program ini. Pada awal kegiatan, praktik verifikasi peserta cenderung kurang maksimal, terutama untuk konten yang sudah dibagikan oleh orang yang dianggap dekat atau dipercaya di komunitasnya. Setelah pelatihan, peserta menunjukkan kecenderungan yang lebih kuat untuk melakukan langkah cek sederhana, memeriksa sumber, mengecek konteks, membandingkan dengan sumber lain dan menghindari kesimpulan cepat berdasarkan potongan narasi. Refleksi peserta menunjukkan adanya perubahan pola pikir dari “*cepat membagikan karena penting*” menjadi “*menahan diri untuk memeriksa karena dampaknya bisa luas*”. Dalam konteks *civic resilience*, perubahan ini menjadi sangat penting dan krusial karena ketahanan kewargaan bukan hanya kemampuan memahami, tetapi kemampuan mengubah praktik sehari-hari dalam mengelola arus informasi. Pada segmen ibu-ibu muda pegiat UMKM, perubahan ini tampak menonjol karena mereka menyadari bahwa grup percakapan yang awalnya berorientasi ekonomi dapat dengan cepat berubah menjadi kanal konflik ketika informasi politik yang tidak akurat beredar tanpa kontrol. Intervensi membantu memperkuat kesadaran bahwa ketahanan demokrasi lokal dimulai dari kebiasaan kecil seperti disiplin verifikasi sebelum berbagi.

Dimensi sikap dan etika partisipasi juga menunjukkan perkembangan yang bermakna. Dalam simulasi diskusi dan latihan respons terhadap konten kontroversial, peserta cenderung bergerak dari pola respons reaktif menuju pola respons deliberatif. Mereka lebih mampu menahan dorongan untuk menyerang personal, lebih siap untuk meminta data, dan lebih mau mendengar argumen berbeda. Walaupun dinamika ini bervariasi antar segmen, terdapat kecenderungan umum bahwa setelah intervensi peserta memahami pentingnya etika diskursus sebagai bagian dari ketahanan demokrasi. Pada fase ini, penguatan dari para instruktur menjadi faktor pendorong. Paparan oleh bapak Novy Setia Yunas menekankan bahwa kualitas demokrasi digital ditentukan oleh kualitas *warga digital*, bukan semata teknologi; sementara itu bapak Budi Winarno menekankan bahwa etika digital bukan hanya isu moral, melainkan juga isu stabilitas sosial dan tata kelola lokal, karena konflik horizontal dapat bermula dari percakapan digital yang tidak terkendali.

Analisis perbedaan antar segmen peserta memperlihatkan pola yang memperkaya pembahasan. Siswa SMA dan mahasiswa cenderung mengalami peningkatan lebih cepat pada pemahaman konsep (kesadaran algoritmik dan framing) karena kedekatan masyarakat dengan istilah dan pengalaman platform berbasis konten pendek. Komunitas pemuda menunjukkan penguatan yang menonjol pada dimensi partisipasi deliberatif dan kemampuan membangun argumen, mengingat mereka sudah memiliki pengalaman berorganisasi dan berdiskusi, tetapi memerlukan instrumen untuk mengelola arus informasi digital secara lebih kritis.



Gambar 3. Narasumber Bersama Peserta Program yang Terdiri Dari Siswa SMA, Mahasiswa, Komunitas Muda dan Ibu-Ibu Pegiat UMKM di Kabupaten Jombang

Sementara itu, ibu-ibu muda penggiat UMKM menunjukkan peningkatan yang kuat pada aspek verifikasi dan refleksi etis karena konteks kesehariannya sangat terkait dengan jejaring kepercayaan komunitas dan grup percakapan ([Gambar 3](#)). Pada saat ibu-ibu peserta memahami risiko disinformasi, muncul perubahan perilaku yang cukup nyata dalam menahan diri sebelum membagikan informasi. Variasi ini mengkonfirmasi bahwa *civic resilience* bersifat kontekstual. Kondisi tersebut tidak tumbuh dengan satu pola yang sama, melainkan melalui adaptasi model pada karakter sosial, pengalaman digital dan kebutuhan komunitas.

Secara teoritik, hasil pelaksanaan program ini memperkuat argumentasi bahwa ketahanan demokrasi di era digital tidak cukup ditopang oleh perangkat regulasi dan institusi formal, tetapi perlu ditopang oleh kapasitas masyarakat dalam mengelola paparan informasi, menjaga etika diskursus dan merawat kohesi sosial di tengah polarisasi. Di sinilah *civic resilience* memperoleh makna praktis, dimana hal tersebut kemampuan komunitas untuk tetap rasional dan beradab ketika arus informasi mendorong emosi dan fragmentasi. Hasil program menunjukkan bahwa intervensi berbasis komunitas yang menggabungkan penguatan kesadaran algoritmik, analisis konten, verifikasi informasi dan etika partisipasi dapat menjadi strategi efektif untuk membangun ketahanan tersebut. Lebih jauh, hasil pelaksanaan program ini memberi pesan strategis dalam konteks bonus demografi, dimana dominasi generasi muda dalam struktur pemilih dapat menjadi modal demokrasi, tetapi juga dapat menjadi titik rentan bila tidak disertai penguatan kapasitas pemahaman terhadap kewargaan digital. Dengan kata lain, bonus demografi memerlukan investasi sosial-politik berupa pendidikan kewargaan digital yang tidak normatif, praktis, reflektif dan terukur dampaknya. Dalam hal ini, hasil pengabdian ini memperluas diskusi terdahulu yang lebih banyak berhenti pada level diagnosis masalah demokrasi digital menuju level intervensi praktis yang terukur di tingkat komunitas. Kebaruan dampak ilmiahnya terletak pada integrasi antara pendidikan politik digital, penguatan kesadaran algoritmik dan pembentukan *civic resilience* dalam satu model pelatihan berbasis komunitas lokal.

Meskipun demikian, program ini juga memiliki keterbatasan. Durasi intervensi yang relatif singkat belum memungkinkan pengukuran dampak jangka panjang terhadap perilaku partisipasi digital peserta. Selain itu, dinamika algoritmik platform digital bersifat dinamis dan terus berubah, sehingga model intervensi perlu terus diperbarui agar tetap relevan. Keterbatasan ini menjadi dasar penting untuk perencanaan tindak lanjut yang lebih sistematis. Sebagai tindak lanjut, diperlukan pengembangan mekanisme keberlanjutan melalui pembentukan forum diskusi digital sehat berbasis komunitas serta penguatan peran *peer educator* dari peserta yang menunjukkan kapasitas dan komitmen tinggi. Selain itu, modul intervensi yang telah dikembangkan dapat diformalkan sebagai panduan praktis literasi politik digital bagi komunitas di Kabupaten Jombang dan wilayah lain yang memiliki karakteristik serupa. Pada level kebijakan, kolaborasi antara perguruan tinggi, Bakesbangpol dan institusi pendidikan perlu diperluas agar penguatan *civic resilience* dapat diintegrasikan ke dalam program pembinaan generasi muda secara lebih sistematis. Secara lebih konkret, model program ini direkomendasikan untuk diimplementasikan pada sekolah menengah, organisasi kepemudaan, komunitas desa, dan kelompok perempuan produktif di wilayah lain, dengan penyesuaian pada karakteristik sosial, tingkat literasi digital, dan pola penggunaan media di masing-masing komunitas. Replikasi program juga perlu disertai dengan pendampingan berkala, monitoring pasca pelatihan serta penguatan jejaring kolaboratif antara pemerintah daerah, perguruan tinggi dan komunitas lokal agar dampaknya tidak berhenti pada pelatihan sesaat.

Rekomendasi strategis dari kegiatan ini adalah bahwa literasi politik digital harus diposisikan sebagai bagian integral dari pembangunan demokrasi lokal, bukan sekadar program insidental. Pemerintah daerah dan institusi pendidikan perlu mengembangkan kurikulum atau pelatihan berkelanjutan yang mencakup kesadaran algoritmik, analisis framing, verifikasi informasi dan etika partisipasi digital. Selain itu, evaluasi program serupa di masa mendatang perlu diperkuat dengan desain longitudinal agar mampu menilai konsistensi perubahan perilaku peserta, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberlanjutan *civic resilience* dalam kehidupan digital sehari-hari.

Pada akhirnya, implementasi program di kabupaten Jombang memperlihatkan bahwa keberhasilan penguatan *civic resilience* tidak hanya ditentukan oleh materi, tetapi oleh kualitas orkestrasi aktor dan legitimasi sosial-kebijakan yang menyertainya. Peran tim Pengmas FISIP UB dan lintas perguruan tinggi yang ada memastikan intervensi memiliki kerangka akademik yang kuat, sementara peran mitra program dalam hal ini Bakesbangpol kabupaten Jombang memastikan intervensi terhubung dengan realitas tata kelola lokal dan kebutuhan menjaga harmoni sosial. Kolaborasi ini menghasilkan model yang tidak hanya relevan untuk peningkatan literasi politik digital, tetapi juga relevan sebagai pendekatan penguatan ketahanan demokrasi lokal yang dapat direplikasi dan dikembangkan lebih lanjut. Oleh sebab itu, penyajian hasil program ini tidak hanya penting sebagai laporan capaian kegiatan, tetapi juga sebagai bukti empiris bahwa pelatihan literasi politik digital berbasis komunitas dapat berkontribusi langsung terhadap penguatan kapasitas kewargaan dalam menghadapi tantangan demokrasi digital.

4. Kesimpulan

Program penguatan *civic resilience* pada komunitas muda di kabupaten Jombang menunjukkan bahwa tantangan demokrasi digital di era bonus demografi tidak dapat dijawab semata melalui pendekatan normatif atau sosialisasi yang sifatnya satu arah. Hasil pelaksanaan program telah memperlihatkan bahwa intervensi berbasis literasi politik digital yang dirancang secara partisipatif dan kontekstual mampu menghasilkan perubahan yang bermakna pada dimensi kesadaran algoritmik, kemampuan analisis kritis konten politik, praktik verifikasi informasi serta etika partisipasi digital. Perubahan tersebut bukan hanya terlihat dalam peningkatan pemahaman konseptual, tetapi juga dalam perubahan sikap dan praktik sehari-hari peserta dalam mengelola arus informasi di ruang digital. Dengan demikian, program ini menegaskan bahwa penguatan *civic resilience* dapat menjadi pendekatan praktis yang relevan dalam memperkuat kapasitas kewargaan digital masyarakat muda di tingkat lokal. Secara reflektif, pelaksanaan program ini menunjukkan bahwa fenomena bonus demografi bukanlah jaminan otomatis bagi penguatan demokrasi. Dominasi generasi muda dalam struktur demografi dan politik hanya akan menjadi bonus demokrasi apabila tidak disertai dengan kapasitas kewargaan yang adaptif terhadap struktur algoritmik ruang publik. Tanpa kesadaran tentang bagaimana platform bekerja, bagaimana framing membentuk persepsi dan bagaimana disinformasi menyebar melalui jejaring sosial, generasi muda justru berisiko menjadi medium reproduksi polarisasi dan fragmentasi opini. Oleh karena itu, penguatan *civic resilience* harus dipahami sebagai investasi strategis jangka panjang dalam menjaga kualitas demokrasi digital. Secara evaluatif, model intervensi yang dikembangkan dalam program ini menunjukkan efektivitas dalam membangun kesadaran dan keterampilan kewargaan digital pada berbagai segmen komunitas, meskipun respons antar kelompok menunjukkan hal yang berbeda.

Kondisi ini tentu menjadi pembelajaran penting bahwa pendekatan penguatan ketahanan kewargaan perlu adaptif terhadap karakteristik sosial, pengalaman digital dan konteks komunitas masing-masing. Keterlibatan mitra dan tim telah menunjukkan bahwa kolaborasi antara akademisi dan otoritas kebijakan lokal menjadi faktor penting dalam memperkuat legitimasi, relevansi dan dampak keberlanjutan program. Integrasi perspektif akademik dan kebijakan publik membuat intervensi tidak hanya bersifat edukatif tetapi juga strategis dalam konteks penguatan ketahanan demokrasi lokal.

Pada akhirnya, demokrasi di era digital yang mendasarkan pada konteks algoritma menuntut masyarakat yang tidak hanya melek digital, tetapi juga resilien secara kewargaan. Penguatan *civic resilience* pada komunitas muda merupakan langkah konkret untuk memastikan bahwa transformasi digital berjalan seiring dengan penguatan nilai deliberasi, rasionalitas dan kohesi sosial. Dengan demikian, bonus demografi Indonesia dapat diarahkan menjadi fondasi demokrasi yang lebih tangguh, inklusif dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, pengabdian masyarakat berbasis literasi politik digital tidak seharusnya dipandang sebagai kegiatan pelengkap, melainkan sebagai bagian dari strategi pembangunan demokrasi lokal yang responsif terhadap perubahan sosial dan teknologi.

Acknowledgement

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya (FISIP UB) atas dukungan institusional dan fasilitasi yang diberikan dalam pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada kolaborator yakni Universitas Negeri Surabaya dan Politeknik STIA LAN Jakarta. Terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada mitra pelaksanaan program pengabdian masyarakat yakni Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) kabupaten Jombang atas kerja sama, koordinasi serta komitmen dalam mendukung penguatan literasi politik dan ketahanan demokrasi di tingkat lokal. Apresiasi setinggi-tingginya juga diberikan kepada seluruh sekolah, komunitas pemuda, kelompok UMKM, serta para peserta yang telah berpartisipasi secara aktif dan konstruktif dalam setiap tahapan kegiatan. Keterbukaan, antusiasme dan kontribusi pemikiran dari seluruh pihak menjadi faktor penting dalam keberhasilan program ini.

Daftar Pustaka

- Bradbury, H. (2015). *The SAGE Handbook of Action Research* (Third Edit). SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.4135/9781473921290>
- Gillespie, T. (2019). Custodians of the Internet. In *Custodians of the Internet* (Issue January 2018). Yale University Press. <https://doi.org/10.12987/9780300235029>
- Greenwood, D., & Levin, M. (2007). *Introduction to Action Research* (2nd ed.). SAGE Publications, Inc. <https://doi.org/10.4135/9781412984614>
- Guess, A. M., Nyhan, B., & Reifler, J. (2020). Exposure to untrustworthy websites in the 2016 US election. *Nature Human Behaviour*, 4(5), 472–480. <https://doi.org/10.1038/s41562-020-0833-x>
- Hall, P. A., & Lamont, M. (2013). *Social Resilience in the Neoliberal Era*. Cambridge University Press.

- Kellner, D., & Share, J. (2008). Critical media education, radical democracy and the reconstruction of education. *Educacao e Sociedade*, 29(104), 687–715. <https://doi.org/10.1590/s0101-73302008000300004>
- Khairina, E., Purnomo, E. P., & Malawnai, A. D. (2020). Sustainable Development Goals: Kebijakan Berwawasan Lingkungan Guna Menjaga Ketahanan Lingkungan Di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(2), 155.
- Lewandowsky, S., Ecker, U. K. H., & Cook, J. (2017). Beyond Misinformation: Understanding and Coping with the “Post-Truth” Era. *Journal of Applied Research in Memory and Cognition*, 6(4), 353–369. <https://doi.org/10.1016/j.jarmac.2017.07.008>
- Margetts, H., & Dorobantu, C. (2019). Rethink government with AI. *Nature*, 568(7751), 163–165. <https://doi.org/10.1038/d41586-019-01099-5>
- Norris, P. (2011). *Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited*. Cambridge University Press.
- Pariser, E. (2012). *The Filter Bubble: How the New Personalized Web Is Changing What We Read and How We Think*. Penguin Books.
- Riccardi, M. T., Pettinicchio, V., Di Pumpo, M., Altamura, G., Nurchis, M. C., Markovic, R., Šagrić, Č., Stojanović, M., Rosi, L., & Damiani, G. (2023). Community-based participatory research to engage disadvantaged communities: Levels of engagement reached and how to increase it. A systematic review. *Health Policy*, 137, 104905. <https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2023.104905>
- Sunstein, C. R. (2018). *#Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media* (NED-New). Princeton University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv8xnhtd>
- Tucker, J., Guess, A., Barbera, P., Vaccari, C., Siegel, A., Sanovich, S., Stukal, D., & Nyhan, B. (2018). Social Media, Political Polarization, and Political Disinformation: A Review of the Scientific Literature. *SSRN Electronic Journal*, January. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3144139>
- Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The spread of true and false news online. *Science (New York, N.Y.)*, 359(6380), 1146–1151. <https://doi.org/10.1126/science.aap9559>
- Yunas, N. S., & Nailufar, F. D. (2021). Pemberdayaan Ruang Inovasi Kabupaten Jombang Sebagai Komunitas Pemuda Penggerak Pembangunan Desa Dalam Optimalisasi Produk UMKM. *Surya Abdimas*, 5(4), 561–572. <https://doi.org/10.37729/abdimas.v5i4.1371>

Article History			Contribution to SDGs	
Submitted	Revised	Accepted	4 QUALITY EDUCATION	16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS
21/02/2026	20/04/2026	23/07/2026		